

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah. Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*). Bandung: P.T Alumni, 2017.
- _____ dan Bambang Waluyo. Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*). Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Hasrul Halili, dkk. Rubuhnya Pengadilan Kami Rekaman Atas Pelaksanaan KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Pengadilan di DIY dan Jawa Tengah, Jakarta: Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan *Open Institute Society* (OSI), 2009.
- Jimly Asshidiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Bahaan Bacaan Klinik Etik dan Hukum Buku 1 Materi Hukum. Jakarta:Komisi Yudisial, 2015.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suhartoyo. *Contempt of Court di Indonesia*. Bandung : PT Alumni, 2016.
- Ma'shum Ahmad. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta : Total Media, 2009
- Moh. Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____. Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rimdan. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sudaryono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Zainal Asikin, dkk. Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum MAsyarakat Pengguna Pengadilan. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court*.

C. Internet

Anita Afrina, Artaji, dkk . Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018 diakses dalam <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/217>

Budi Suhariyanto, *Contempt of Court* dalam Perspektif Hukum Progresif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum MA-RI, Agustus 2016. Diakses dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/22>

Bagir Manan, Penghinaan terhadap peradilan versus kebebasan pers, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 Juli 2015 diakses dalam <http://114.129.22.229:5555/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/61>

Jacob S. Ziegel, *some aspects of the law of contempt of court in canada, england, and the united state*, *MC Gill Law Journal*, vol 6, 1959

M. Ilham F. Putuhena, Politik Hukum Perundang-Undangan; Mempertegas reformasi legislasi yang Progresif, Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.3 Desember 2013 diakses dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/66>

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court* diakses dalam <https://www.mahkamahagung.go.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfbbe26e4b89/i-contempt-of-court-i--krisis-hukum-kah-oleh--agusty-pranajaya/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6c700ce303a/beragam-profesi-ini-terancam-ketentuancontempt-of-court-di-rkuhp/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593588044e278/dilema-wakil-tuhan-sebagai-pejabat-negara/>

